

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	viii
Lampiran	xi
Abstract	xii
Intisari	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	17
E. Keaslian Penelitian	18
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Perjanjian.....	21
1. Pengertian Perjanjian	21
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	25
3. Asas-Asas Pejanjian.....	29
4. Akibat Hukum Perjanjian Yang Sah.....	32
B. Jenis-Jenis Perjanjian	35
1. Perjanjian Sepihak dan Timbal Balik	35
2. Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian atas Beban	35
3. Perjanjian Konsensuil, Perjanjian Riil dan Perjanjian Formil	36
4. Perjanjian Bernama, Perjanjian Tak Bernama dan Perjanjian Campuran	36
C. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	39
1. Pengertian Konsesi.....	39
2. Tindakan Hukum Pemerintah.....	41
3. Peraturan Kebijakan.....	44
4. Instrumen Hukum Keperdataan yang dapat digunakan Pemerintah..	46
5. Infrastruktur Sebagai Public Goods.....	48
6. Latar Belakang Kerjasama Pemerintah-Swasta.....	51
7. Bentuk Perjanjian Kerjasama Pemerintah Swasta.....	52
D. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Kepelabuhanan.....	52
1. Kepelabuhanan.....	52
2. Ketentuan Pengelolaan TUKS: dulu dan saat ini.....	54
3. Ketentuan Konsesi dalam PP 61 Tahun 2009.....	58
4. Ketentuan Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya.....	62
5. Kegiatan TUKS melayani Kepentingan Umum.....	66
E. Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Kepelabuhanan.....	68

1. Pengertian.....	68
2. Jenis dan Tarif.....	68
3. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	70
4. Jenis dan Tarif PNBPN yang Berlaku pada Departemen Perhubungan.....	71
F. Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepeleabuhanan.....	73
1. Mekanisme Penyusunan Tarif Pelayanan Jasa Kepeleabuhanan.....	74
2. Pedoman Penetapan Harga Jual (<i>Charge</i>) Jasa Kepeleabuhanan yang Diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.....	75
3. Batas Harga Jual Jasa Kepeleabuhanan.....	77
BAB III METODE PENELITIAN.....	78
A. Metode Pendekatan.....	78
B. Spesifikasi Penelitian.....	79
C. Jenis Data dan Sumber Data.....	80
D. Metode Pengumpulan Data.....	83
E. Analisis Data.....	85
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	87
A. Implementasi pemanfaatan fasilitas Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di Kawasan Kepeleabuhanan antara Pengelola Terminal dengan Pengguna Jasa Kepeleabuhanan	87
1. Sejarah Perusahaan	87
2. Perkembangan Pelayanan Jasa Kepeleabuhanan	88
3. Pelanggan PT. Krakatau Bandar Samudera	91
4. Pola Kerjasama PT. KBS dan Customer PT. KBS.....	93
5. Pembahasan	95
B. Implementasi Perjanjian Kerjasama Pengelolaan TUKS dengan Penyelenggara Pelabuhan	106
1. Perjanjian Kerjasama untuk Pengelolaan Pelayanan Umum di TUKS PT Krakatau Steel	106
2. Perjanjian Kerjasama TUKS melayani Umum sesuai dengan PM.15/2015	112
3. Pembahasan	115
C. Kendala-kendala dalam Implementasi Perjanjian Pemanfaatan Fasilitas antara Pengelola Terminal dengan Pengguna Jasa Kepeleabuhanan... ..	124
1. Kendala dalam Aspek Pelayanan	124
2. Kendala dalam Aspek Legalitas Pertarifan	132
D. Kendala-kendala dalam implementasi perjanjian antara Pengelola Terminal dengan Penyelenggara Pelabuhan	135
Kendala Pemungutan Jasa Kepeleabuhanan	135
a. Sebelum berlakunya PP Nomor 11 Tahun 2015 tentang PNBPN....	136
b. Setelah berlakunya PP Nomor 11 Tahun 2015 tentang PNBPN.....	138
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	142
A. Kesimpulan	

1. Implementasi pemanfaatan fasilitas Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di Kawasan Kepelabuhanan antara Pengelola Terminal dengan Pengguna Jasa Kepelabuhanan	142
2. Implementasi hubungan hukum antara Pengelola Terminal dengan Penyelenggara Pelabuhan.....	143
3. Kendala-kendala dalam implementasi perjanjian pemanfaatan fasilitas antara Pengelola Terminal dengan Pengguna Jasa Kepelabuhanan..	144
4. Kendala-kendala dalam implementasi perjanjian antara Pengelola Terminal dengan Penyelenggara Pelabuhan	145
B. Saran.....	146
 DAFTAR PUSTAKA	 148

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1, Pelabuhan yang diusahakan, berdasarkan pengelolaan dan kelasnya
Tabel 1.2, Pelabuhan yang diusahakan, berdasarkan pengelolaan dan kelasnya
Tabel 4.1, Trend Pertumbuhan Cargo 2007-2011
Tabel 4.2, Tonnase Pelabuhan di Luar Cigading
Tabel. 4.3, Agen Pelayaran
Tabel. 4.4, Pemilik Barang
Tabel. 4.5, Jasa Pengurusan Transportasi Laut
Tabel 4.3.1, Implikasi Kebijakan Untuk Ketepatan Jadwal Pelayanan
Tabel 4.3.2, Implikasi Kebijakan Untuk Pelayanan Sandar/Lepas Kapal
Tabel 4.3.3, Implikasi Kebijakan Untuk Pelayanan Bongkar/Muat
Tabel 4.3.4, Implikasi Kebijakan Untuk Pelayanan Crane
Tabel 4.3.5, Implikasi Kebijakan Untuk Pelayanan Alat Berat
Tabel 4.3.6, Implikasi Kebijakan Untuk Pelayanan Gudang
Tabel 4.3.7, Implikasi Kebijakan Untuk Pelayanan Kawasan Pelabuhan
Tabel 4.3.8, Implikasi Kebijakan Untuk Pelayanan Timbangan
Tabel 4.3.9, Implikasi Kebijakan Untuk Pelayanan BA dan Invoice